





Pilgub Bali 2018

# Dana Kampanye Maksimal

## Rp 46,538 Miliar

Denpasar (Bali Post) -

Dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Bali 2018 dibatasi maksimal Rp 46,538 miliar untuk masing-masing pasangan calon. Jika pengeluaran untuk kampanye melebihi ketentuan maksimal itu, pasangan calon bisa dikenakan sanksi diskualifikasi.

"Masing-masing tim pasangan calon sudah menyampaikan usulannya. Disepakati angkanya Rp 46.538.867.500. Tinggal nanti KPU meng-SK-kan dan itulah nanti yang dijadikan acuan," ujar Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa

Kade Wiarsa Raka Sandi di sela-sela Rapat Petunjuk Teknis Dana Kampanye di Kantor KPU setempat, Jumat (9/2) kemarin.

Ia berharap ketentuan maksimal dana kampanye ini ditaati dan dihormati oleh semua pihak.

Dana kampanye bisa berbentuk uang, barang dan atau jasa. Antara lain bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, serta sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. "Sumbangan perseorangan diatur paling banyak Rp 75 juta. Sumbangan dari kelompok atau badan hukum swasta paling banyak Rp 750 juta," paparnya.

Raka Sandi menambahkan, sumber dana kampanye dari

keuangan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon juga dibatasi yakni maksimal Rp 750 juta setiap partai politik selama masa kampanye. Partai politik atau gabungan partai politik juga wajib membuka rekening khusus dana kampanye pada bank umum paling lambat 12 Februari 2018. "Dana kampanye dari pasangan calon tidak dibatasi berapa mereka memberikan sumbangan untuk kepentingan kampanye," jelasnya.

Komisioner KPU Bali Ni Putu Ayu Winariati mengatakan, sumbangan yang melebihi ketentuan maksimal dana kampanye tidak boleh dipergunakan. Kelebihan sumbangan itu wajib dilaporkan ke KPU Provinsi Bali dan diserahkan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir. "KPU Provinsi akan memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan ke kas negara. Kalau tidak, akan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai pas-

gan calon," tandasnya.

Menurutnya, Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diserahkan 14 Februari mendatang, Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) diserahkan 20 April 2018 dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) diserahkan 24 Juni 2018. LPDDK selanjutnya dibawa ke Kantor Akuntan Publik untuk diaudit. Hasil audit diumumkan pada 11-13 Juli 2018. (kmb32)

Edisi : Sabtu, 10 Februari 2018

Hal : 5





## Dana Kampanye Maksimal Rp 46,53 Miliar Jika Sampai Melebihi, Kandidat Diskualifikasi

DENPASAR, NusaBali  
Biaya kampanye masing-masing pasangan Calon Gubernur (Cagub)-Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Bali dalam Pilgub 2018, dibatasi maksimal Rp 46,53 miliar. Jika dana kampanye sampai melebihi dari kesepakatan, kandidat bersangkutan akan didiskualifikasi.

Kesepakatan ini diam-

Bersambung ke Hal-15 Kolom 5

BIAYA MAKSIMAL KAMPANYE PASANGAN CAGUB-CAWAGUB BALI <i>Bali 2018</i>		
NO	ALOKASI	BIAYA MAKSIMAL
1	Pembuatan Bahan Kampanye	Rp 22,68 Miliar
2	Pertemuan Tatap Muka	Rp 12,53 Miliar
3	Pertemuan Terbatas	Rp 6,37 Miliar
4	Pamflet, Flyer, Poster	Rp 2,84 Miliar
5	Kampanye Rapat Umum	Rp 1,10 Miliar
6	Pengadaan Umbul-umbul	Rp 0,42 Miliar
7	Pengadaan Baliho	Rp 0,25 Miliar
8	Pengadaan Spanduk	Rp 0,21 Miliar
9	Jasa Konsultan Kampanye	Rp 0,10 Miliar
<b>TOTAL</b>		<b>Rp 46,53 Miliar</b>

## Jika Sampai Melebihi, Kandidat Diskualifikasi

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

bul melalui pembahasan yang alot dalam rapat koordinasi terkait jadwal dan dana kampanye di Kantor KPU Bali, Jalan Tjokorda Agung Tresna Niti Mandala Denpasar, Jumat (9/2) siang. Rapat yang berlangsung selama 2 jam mulai pukul 14.00 Wita sampai sore pukul 16.00 Wita itu dipimpin Ketua KPU Bali Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dengan didampingi komisioner I Wayan Jondra, Luh Putu Ayu Winariati, dan Ni Kadek Wirati.

Pasangan Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (KBS-Ace), Cagub-Cawagub Bali yang diusung PDIP-Hanura-PKPI-PAN-PKB-PPP, dalam pertemuan kemarin diwakili Koordinator Liaison Officer (LO) I Nyoman Satria, dengan didampingi I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi. Sedangkan pasangan IB Rai Dharmawijaya Mantra-I Ketut Sudikerta (Mantra-Kerta), Cagub-Cawagub Bali yang diusung Golkar-Demokrat-Gerindra-NasDem- PKS-PBB, diwakili Ketua Tim Pemenangan Mantra-Kerta Provinsi Bali Gede Ngurah Wididana alias Pak Oles, dengan didampingi sejumlah anggota timnya.

Dalam rapat kemarin, disepakati dana maksimal yang boleh digunakan pasangan Cagub-Cawagub untuk Pilgub Bali selama masa kampanye akan dilaksanakan selama 4 bulan, mulai 15 Februari 2018 sampai 23 Juni 2018, adalah Rp 46,53 miliar. Ada 9 item alokasi dana kampanye dengan besaran biaya maksimalnya

masing-masing, yang tidak boleh dilanggar. Jika sampai melebihi ketentuan, pasangan calon akan didiskualifikasi.

Kegiatan kampanye yang dibiayai pasangan calon, mulai rapat umum, pertemuan terbatas, pembuatan bahan kampanye, jasa manajemen/konsultan, alat peraga kampanye (baliho, umbul-umbul, spanduk), hingga bahan kampanye (berupa poster, pamflet). Yang paling banyak menghabiskan biaya adalah pembuatan bahan kampanye, sebesar Rp 22,68 miliar. Pembuatan bahan kampanye ini rinciannya 1 kali pertemuan x 30 persen x 3.025.066 pemilih = Rp 22,68 miliar.

Biaya maksimal kampanye berupa pertemuan tatap muka yang melibatkan 500 orang (716 kali kegiatan), disepakati Rp 12,53 miliar. Sementara biaya kampanye berupa rapat umum yang melibatkan 10.000 massa (dua kali kegiatan), disepakati maksimal Rp 1,10 miliar. Sedangkan pertemuan terbatas dengan melibatkan 1.500 massa (17 kali kegiatan), biaya maksimal disepakati Rp 6,30 miliar. *(Selengkapnya, lihat tabel).*

Dalam rapat kemarin, KPU Bali langsung minta pasangan calon kontestan Pilgub Bali 2018 untuk membuat rekening dana kampanye. Pasalnya, Bawaslu Bali akan segera melakukan pengawasan terhadap dana kampanye pasangan calon.

"Silakan membuat rekening khusus. Nanti dana awal kampanye, sumbangan atau sumber perolehan dan penggunaannya, akan diawasi oleh Bawaslu secara ketat. Saat ini

Bawaslu sudah bisa mengawasinya langsung, tanpa menunggu hasil audit," papar komisioner KPU Bali, Putu Winariati.

Sedangkan Ketua KPU Bali, Dewa Raka Sandi, mengingatkan para kandidat harus mentaati kesepakatan soal biaya kampanye. Kalau tidak, sanksinya berat yakni didiskualifikasi dari Pilgub Bali 2018. "Jadi apa yang sudah disepakati sekarang, mengenai batasan maksimal dana kampanye supaya ditaati. Kalau sampai dilanggar atau melebihi kesepakatan, sanksinya didiskualifikasi," tandas Raka Sandi se usai rapat kemarin.

Penggunaan dana kampanye yang berasal dari pihak asing dalam Pilgub Bali 2018 juga diawasi ketat Bawaslu Bali. Pasangan Cagub-Cawagub yang ketahuan menerima dan menggunakan dana dari pihak asing untuk kampanye dan tidak melaporkannya kepada KPU Bali, terancam didiskualifikasi.

Untuk dana kampanye yang bersumber dari pasangan calon sendiri, tidak dibatasi besarnya. Sedangkan dana kampanye bersumber dari kelompok atau badan usaha swasta dibatasi maksima Rp 750 juta. Sementara dana kampanye dari perseorangan, dibatasi maksimal Rp 75 juta.

Pasangan calon dilarang menerima dana kampanye dari pihak asing, baik itu negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, maupun warga negara asing. Demikian pula dana kampanye yang bersumber dari keuangan negara atau daerah seperti BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, dilarang. *(nat)*



## Polisi Bidik Dugaan Dana Hibah Digunakan Bayar Utang

Semarapura (Bali Post) -

Informasi adanya dugaan penggunaan bantuan hibah penunjang urusan kebudayaan untuk pembayaran utang di Lembaga Perkreditan Desa, memantik perhatian Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Klungkung. Menindaklanjuti hal tersebut, Unit Tipikor segera diturunkan untuk mengumpulkan data.

Kasat Reskrim Polres Klungkung AKP I Made Agus Dwi Wirawan mengungkapkan hal tersebut akan dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga (Disbudpora) sebagai *leading sector* yang menangani hibah tersebut. "Tentu kami akan melihat aturannya dulu. Usulannya seperti apa, hasil laporannya seperti apa. Unit Tipikor segera saya minta untuk turun," ungkapnya, Jumat (9/2) kemarin.

Mantan Kasat Narkoba Polres Buleleng ini menyatakan belum ada laporan terkait informasi penyelewengan. Namun yang namanya hibah, memang rentan terjadi hal tersebut. "Kalau potensi penyelewengan, pasti ada," imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Klungkung Gede Putu Winastra menyatakan penggunaan dana tersebut sudah ditegaskan harus mengacu pada aturan. Namun, ia belum bisa berkomentar terkait pelaksanaan evaluasi.

Seperti berita sebelumnya, dugaan penggunaan dana hibah untuk bayar utang terungkap saat tim Disbudpora di Kecamatan Klungkung saat melaksanakan monitoring dan evaluasi. Tak hanya itu, beberapa penerima juga terungkap mengibuli dengan terlebih dahulu membangun, baru mengusulkan permohonan hibah ke pemkab maupun ada dua usulan untuk pembangunan satu pura di wilayah Kecamatan Banjarangkan dengan nominal masing-masing Rp 30 juta dan Rp 20 juta. Satu usulan difasilitasi DPRD Klungkung. Sejalan dengan temuan itu, pemohon langsung mengembalikan dana Rp 20 juta ke daerah.

Kadisbudpora Klungkung I Nyoman Mudarta menyatakan, mengantisipasi munculnya persoalan serupa untuk penggelontoran hibah tahun selanjutnya akan dilakukan verifikasi sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). "Benar apa tidak belum dibangun atau diperbaiki. Karena di proposal bahasanya kan akan (diperbaiki/dibangun - red)," sebutnya. (kmb45)



AKP I Made Agus Dwi Wirawan

Bali Post/sos

Edisi : Sabtu, 10 Februari 2018

Hal : 12





## Sembilan Proyek Irigasi Dianggarkan Rp 8,3 Miliar



Bali Post/nan

**I Made Soma**

3.634.304.000 untuk melaksanakan enam kegiatan fisik yakni peningkatan jaringan irigasi di Yangapi, Tembuku, peningkatan jaringan irigasi Puluh, Susut, peningkatan jaringan di Uma Desa 1, Susut, peningkatan irigasi Uma Desa 2, Susut, peningkatan jaringan irigasi di Bunutin, Kintamani dan peningkatan jaringan irigasi Aye Kelurahan Kawan.

Sementara untuk anggaran dari PKB-BBNKB sebesar Rp 4.712.868.000 ada tiga proyek yakni peningkatan jaringan irigasi di Manuk, Susut, peningkatan jaringan di Banjar Kikian, Susut dan peningkatan jaringan irigasi di Sidembunut kiri. "Jadi, total sembilan proyek peningkatan jaringan irigasi tahun ini anggaran Rp 8.347.172.000," ungkapnya.

Dijelaskannya, pengerjaan proyek tersebut sampai saat ini memang belum berjalan. Pasalnya, saat ini masih dalam proses perencanaan dan survei lokasi proyek oleh konsultan. "Beberapa hari lalu telah dilakukan pengecekan lokasi oleh konsultan. Kita targetkan Maret, proyek ini sudah bisa berjalan," harapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sebelum proyek tersebut dijalankan, pihaknya lebih dulu melakukan koordinasi dengan subak setempat terkait kapan akan diberikan waktu untuk melaksanakan proyek. Pihaknya tidak ingin perbaikan jaringan irigasi mengganggu pola tanam subak.

"Kita tidak ingin saat masa tanam kita justru menutup saluran air ke subak. Kalau sudah mencapai kesepakatan bersama, baru perbaikan jaringan akan dilakukan," tegas Soma. (kmb41)

Edisi : Sabtu, 10 Februari 2018

Hal : 8



Kasus BPD Bali

## Pidsus Tipikor Dalam Keterangan Saksi

Denpasar (Bali Post) -

Penyidik Pidsus Tipikor Kejati Bali tampaknya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merampungkan kasus dugaan penyimpangan pencairan kredit investasi hingga Rp 200 miliar di BPD Bali. Setelah memeriksa para saksi dan melakukan pengecekan agunan yang digunakan debitur, penyidik dari Kejati Bali saat ini sedang mendalami keterangan saksi. Hal itu dibenarkan Kasipenkum Humas Kejati Bali Edwin Beslar saat dikonfirmasi terkait perkembangan penyidikan kasus BPD Bali, Jumat (9/2) kemarin.

Di samping mendalami keterangan saksi yang sudah tertuang dalam berita acara pemeriksaan, kata Edwin Beslar, penyidik pimpinan Otto S. juga sedang menguatkan alat bukti yang sudah dikumpulkan. "Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap keterangan para saksi dan menguatkan alat-alat bukti," jelas pejabat asal Manado itu.

Informasi yang diperoleh

*Bali Post*, dari pendalaman keterangan saksi dan didukung penguatan alat bukti inilah celah penyidik untuk menentukan pihak-pihak yang mesti bertanggung jawab untuk selanjutnya dijadikan sebagai tersangka. Hal itu diperkuat dengan belum adanya ekspos sebagai langkah menentukan tersangka dalam perkara ini.

Edwin Beslar yang dikonfirmasi terkait ekspos tersebut

membenarkan bahwa ekspos perkara belum dilakukan. Itu artinya, penetapan calon lima tersangka sebagaimana disampaikan Otto S. beberapa waktu lalu juga belum ditentukan.

Sebelumnya dijelaskan, selain menunggu saksi dari luar Bali, pihaknya juga sudah merampungkan pemeriksaan sejumlah saksi. Selain memeriksa OJK, penyidik pimpinan Otto S. sudah selesai memeriksa saksi dari

pihak Bank Danamon. Korelasinya dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, bahwa debitur yang diduga bermasalah ini sebelumnya ada urusan kredit dengan pihak Bank Danamon.

Terkait kasus BPD Bali, Otto S. sudah memeriksa puluhan orang saksi dan ahli dalam indikasi adanya dugaan penyimpangan pencairan kredit investasi hingga Rp 200 miliar. Bahkan dalam perkara yang sudah dinaikkan statusnya ke tingkat penyidikan itu, Otto sudah mengantongi lima orang calon tersangka. Soal kemungkinan bertambahnya calon tersangka, Otto mengatakan masih berproses dan sedang dalam proses penyi-

dikan karena pihak penyidik masih mengembangkan atau menyidik mata rantai yang disebut terputus-putus.

Otto menjelaskan, pihaknya tidak mau menyebut kasus BPD Bali ini adalah kasus kredit fiktif. Namun, kata dia fisik (kredit) itu ada, namun penuntasan atas kewajiban atas fisik yang mereka pinjam tidak tuntas. "Jadi, tidak tuntas dalam pengembalian kredit," tegasnya bersama Edwin Beslar kala itu. (kmb37)



Berita ini bisa dikomentari pada acara Citra Bali Radio Global FM Pukul 08.00 - 09.30 wita.

Hubungi telepon 0361-7400391

Edisi : Sabtu, 10 Feb 2018

Hal : 2



**PENGHARGAAN** - *Kapolres Klungkung AKBP Bambang Tertianto (tengah) menerima penghargaan dalam hal penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan tahun 2017, Kamis (8/2).*

### Penyampaian LPJ Keuangan

## Polres Kembali Raih Penghargaan

**Semarang (Bali Post)** - Polres Klungkung kembali meraih penghargaan satker terbaik kedua dalam hal penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan tahun 2017. Penyerahannya oleh Kakanwil Dirjen Pembendaharaan Negara Provinsi Bali Dedy Supandi kepada Kapolres AKBP Bambang Tertianto berlangsung di Inna Sindhu Beach Hotel, Sanur, Kamis (8/2).

Penghargaan ini merupakan kali kelima yang berhasil diraih. Pertama tahun 2013 sebagai peringkat terbaik pertama di bidang penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Pada 2015 keluar sebagai terbaik kedua. Pada 2016 sebagai peringkat terbaik pertama, 2017 peringkat terbaik pertama dan terakhir tahun ini. " Ini

penghargaan kelima," jelas Kasi Keu Polres Klungkung Aiptu Wayan Murtika.

Kapolres Klungkung AKBP Bambang Tertianto menyatakan, penghargaan ini diharapkan mampu memberikan motivasi peningkatan kinerja Polres Klungkung dalam hal penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan di tahun yang akan datang. "Tentu dengan penghargaan ini, kinerja harus semakin baik," ungkapnya.

Menurutnya, prestasi ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh personel bagian keuangan. Sebagai pengguna anggaran Polres Klungkung berusaha mewujudkan transparansi dan akuntabel dalam hal pertanggungjawaban keuangan. (kmb45)

Edisi : Sabtu, 10 Februari 2018

Hal : 12





Percepat Tangani Pasien Operasi

# RSUD Bangun IBS, Dianggarkan Rp 20 Miliar

Semarapura (Bali Post)-

Pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Klungkung yang hendak menjalani operasi masih harus menunggu dalam waktu cukup lama. Mengatasi hal tersebut, tahun ini dibangun gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS). Anggarannya mencapai Rp 20 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Kasubag Humas RSUD Klungkung Gusti Putu Widiyasa mengatakan, memang antrean pasien untuk menjalani operasi masih tergolong lama. Namun demikian, ditegaskan rumah sakit tetap mengedepankan skala prioritas, dalam artian mengutamakan pasien yang sakitnya lebih parah. "Untuk operasi kan tergantung hasil pe-

meriksaan. Kalau dokter menyatakan segera untuk operasi, pasti ditangani duluan," terangnya, Jumat (9/2) kemarin.

Sementara itu, Direktur RSUD I Nyoman Kesuma menyampaikan, pembangunan IBS dipastikan berjalan tahun ini. Ditargetkan 12 Februari sudah masuk Unit Lelang Pengadaan (ULP). Sesuai

perencanaan, akan dibangun lima unit ruang operasi serta ruang sebelum maupun sesudah penanganan. Sementara untuk peralatannya, diberikan pemerintah pusat. "Dana hanya untuk pembangunan gedung saja," sebutnya.

Disampaikan pula, saat rapat pemantapan perencanaan ada penyesuaian harga material. Pasalnya, yang

tercantum sebelumnya masih mengacu pada 2017. "Tahun ini material pasir dan batu harganya meningkat. Ini sudah disesuaikan," terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi II DPRD Klungkung I Wayan Buda Parwata menyatakan, pembanguan yang dianggarkan cukup besar ini harus segera masuk ULP untuk mempercepat mendapatkan pemenang. Hal ini untuk menghindari pengerjaan molor. Secara otomatis berimbas pada menundaan pemanfaatan oleh masyarakat. "Perlu secepatnya masuk ULP untuk pelelangan," ungkapny.

Selain rumah sakit, proyek lain juga harus demikian. Menurut politisi Hanura ini, langkah percepatan pembangunan sudah terus dikampanyekan bupati. Namun hal tersebut dinilai belum mendapatkan aksi gayung bersambut dari OPD secara maksimal. Hal seperti ini menurutnya juga perlu dievaluasi. "Masa bupati sendiri yang berjalan cepat. Sedangkan bawahannya masih loyo kinerjanya. Malu dong. Ini harus jadi pertimbangan bupati dalam menilai kinerjanya," tandasnya. (kmb45)

Edisi : Sabtu, 10 Februari 2018

Hal : 12



Penataan Lapangan Puputan dan Pantai Goa Lawah

# Dianggarkan Rp 9,8 Miliar

Semarang (Bali Post) -

Penataan ruang publik kembali digulirkan Pemkab Klungkung tahun ini. Sesuai perencanaan, akan menasar Lapangan Puputan Klungkung dan Pantai Goa Lawah, Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan. Anggaran yang disiapkan mencapai Rp 9,8 miliar.

Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta, Rabu (10/1) kemarin menjelaskan, penataan Lapangan Puputan yang selama ini dijadikan masyarakat sebagai tempat berolahraga maupun aktivitas lainnya menjadi skala prioritas. Bahkan, perencanaannya sudah rampung tersusun. Anggaran yang disiapkan tak tanggung-tanggung.

Untuk penataan taman maupun pengadaan pendukung lain, seperti *trekking* dan tempat duduk mencapai Rp 2,3 miliar. Di lokasi ini juga direncanakan ada pembangunan patung Ida Dewa Agung Jambe yang dianggarkan Rp 4 miliar. "Taman bermain juga ada untuk anak-anak, dewasa dan lansia. Wifi ditambah. Seluruhnya akan ditata. Total anggaran Rp 6,3 miliar," tegasnya.

Bupati asal Nusa Ceningan ini menyatakan lapangan tersebut juga sekaligus menjadi Bencingah Puri Agung Klungkung sebagai tempat



Bali Post/sos

**PENATAAN - Lapangan Puputan Klungkung. Tahun ini Pemkab berencana melakukan penataan dengan anggaran miliaran rupiah. Hal serupa juga akan dilakukan pada Pantai Goa Lawah.**

raja bersama keluarga untuk melihat suasana perkotaan. "Ini wujud apresiasi saya kepada tokoh puri beserta keluarga. Cara menempatkan beliau banyak. Termasuk *city tour* yang juga bisa ke puri," ungkapnya.

Disampaikan lebih lanjut, dengan ruang publik yang tertata, diharapkan masyarakat bisa menghabiskan waktu berlibur di tengah kota. Tidak harus keluar menuju daerah lain. Selain itu, tingkat kebhagiaannya dapat meningkat karena telah mendapatkan tempat yang nyaman dan

layak. "Dengan situasi seperti sekarang, banyak yang jalan-jalan di lapangan. Harapan saya dengan penataan, masyarakat tidak jauh-jauh langcong. Nikmati saja yang ada di sini," ucapnya.

Sementara itu, untuk penataan Pantai Goa Lawah, dianggarkan Rp 3,5 miliar. Objek wisata ini nantinya akan diintegrasikan dengan pertanian garam yang juga dibangkitkan Pemkab. "Setelah jadi akan dikelola desa," imbuhnya.

Perbekel Pesinggahan Nyoman Suastika sempat menyatakan kondisi pantai masih

terkesan kumuh. Adanya rencana penataan oleh Pemkab dinilai sebagai langkah strategis. "Sekarang kunjungan saat hari libur cukup ramai. Tetapi pantai masih kumuh. Kalau ada rencana penataan, kami sangat mendukung," ujarnya.

Selain itu, penataan ini juga untuk mendukung status Desa Pesinggahan sebagai desa wisata. Ke depan, langkah serupa juga diharapkan dapat dilakukan pada Bukit Tengah yang lokasinya berdekatan. "Kami berharap penataan ini juga bisa dilakukan," pungkasnya. (kmb45)

Edisi : kamis, 11 Januari 2017

Hal : \_\_\_\_\_



Selamatkan Aset Eks BKKBN

# Pemkab Pastikan Gugatan Hukum Ajukan

Singaraja (Bali Post) -

Masih ingat dengan temuan Badan Keuangan Daerah (BKD) terhadap aset tanah eks Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Desa Pemaron, yang disertifikatkan oleh warga? Setelah melengkapai dokumen terkait aset itu, Pemkab Buleleng akan mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) Singaraja. Upaya ini ditempuh karena Pemkab tidak ingin kehilangan aset. Apalagi, belakangan ini Pemkab masih memerlukan lahan untuk fasilitas penunjang pemerintahan.

Informasi yang dikumpulkan di lapangan Rabu (10/1) kemarin, menyebutkan berkas dan dokumen kepemilikan aset tanah yang dilimpahkan Pemprov Bali kepada Pemkab telah terkumpul. Berkas ini dikumpulkan Badan Keuangan Daerah (BKD) Buleleng. Sekitar satu minggu yang lalu, BKD telah menyerahkan berkas dan bukti kepemilikan berupa

Sertifikat Hak Pakai (SHP) itu kepada Bagian Hukum Setda Buleleng. Sebelum mengajukan gugatan ke PN Singaraja, berkas itu masih dikonsultasikan kepada tim advokasi hukum Pemkab. Meski belum pasti kapan waktunya, upaya hukum ini pasti ditempuh untuk menyelamatkan aset yang diam-diam telah dikuasai warga.

Kepala Bagian Hukum

Setda Buleleng Bagus Gede Bratha yang dihubungi kemarin, membenarkan pihaknya telah menerima berkas dan bukti kepemilikan aset eks BKKBN tersebut. Dia mengatakan, upaya hukum dengan melayangkan gugatan sudah pasti akan ditempuh oleh Pemkab. Namun, pihaknya perlu mengkaji berkas itu termasuk mempelajari ter-

kait celah hukum untuk memperkuat berkas gugatan. Terkait bukti kepemilikan berupa SHP atas tanah eks BKKBN, Bagus Bratha mengatakan, bukti tersebut memang sudah cukup kuat sebagai hak kepemilikan atas aset tanah tersebut. Namun, perlu didalami karena aset yang dikuasai warga itu telah memiliki bukti Sertifikat Hak Milik (SHM). "Sudah kami terima dan sekarang kami masih mengkaji bersama tim advokasi untuk mencari celah hukumnya agar gugatannya kuat. Yang pasti Pemkab akan menggugat karena pemerintah tidak ingin aset hi-

lang begitu saja," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, tanah milik BKKBN yang sudah diserahkan kepada Pemkab Buleleng dikuasai perorangan. Sesuai SHP No. 4 Tahun 1987 Desa Pemaron Pemkab menerima aset tanah seluas 3,6 are. Belakangan, diketahui satu are dikuasai warga dan telah bersertifikat hak milik. Celakanya, tanah yang sudah tercatat sebagai SHM itu sekarang disita oleh bank karena diduga sebelumnya dijadikan jaminan kredit. Meski telah berkurang dari luas keseluruhannya, Pemkab memfungsikan aset itu sebagai gedung kantor sekretariat penyuluh KB-PP sampai sekarang. (kmb38)

Edisi : Kamis, 11 Januari 2018

Hal : 11





## Diajukan Setahun Lalu Bantuan Dana Bencana Belum Terealisasi

Bangli (Bali Post) -

Banjir dan tanah longsor yang menelan 13 korban jiwa serta mengakibatkan kerusakan infrastruktur di Kintamani sudah berlalu setahun lalu. Namun hingga kini, kerusakan infrastruktur berupa jalan, jembatan dan lahan pertanian akibat bencana alam tersebut belum sepenuhnya ditangani pemerintah. Pemkab Bangli sampai saat ini masih menunggu realisasi proposal bantuan dana bencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan tanah longsor yang diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Februari 2017 lalu.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bangli Wawan Karmawan.

kan infrastruktur berupa jalan, jembatan dan lahan pertanian yang perlu mendapat penanaman ada di 23 titik.

jukan dalam proposal mencapai Rp 32 miliar lebih. "Proposal itu sudah masuk ke BNPB," terangnya.

kesesuaian antaran proposal dengan kondisi riil di lapangan untuk selanjutnya diajukan ke Kementerian Keuangan.

Karmawan memaparkan, berdasarkan proposal yang diajukan Pemkab Bangli ke BNPB, infrastruktur yang diusulkan untuk direhabilitasi dan direkonstruksi yakni DPT Jalan Batur-Masem, jembatan Selulung-Kembangari, jembatan Blancan -Bukih, jembatan Siakin-Pinggan, jembatan Pinggan-Alas Meaum, jembatan menuju Pura Wirta Yeh Mampeh, DPT jalan Jalem-Awan, DPT jalan Kembangari-Tanah Gambir, jalan Belokan-Bubung Kelambu,

jalan Bantang-Campetan, jalan Siakin-Pinggan, dan jalan Peludu-Belancan.

Selain jalan dan jembatan, sejumlah lahan pertanian dan perkebunan yang rusak terkena bencana juga diusulkan untuk direhabilitasi dan direkonstruksi. Lahan pertanian dimaksud yakni lahan di Desa Batur Selatan seluas 33,69 ha, Desa Songan A seluas 15,92 ha, Terunyan seluas 37,22 ha, Buahon 50 ha, Batur Utara 9,625 ha, Kedisan 1,17 ha, Batur Tengah 0,96 ha, Songan B 0,67 ha serta Desa Subaya, Siakin dan Sukawana yang usulannya sesuai lampiran RAB. (kmb40)

Edisi : Senin 12 Februari 2018

Hal : 8





Dana Kampanye Rp 46 Miliar ✓

## Hampir Separuhnya untuk Pembuatan Bahan Kampanye

### Denpasar (Bali Post)-

Dana kampanye sebelumnya telah disepakati KPU Provinsi Bali bersama tim kampanye bakal pasangan calon KBS-ACE dan Mantra-Kerta maksimal Rp 46.534.867.500 (bukan Rp 46,538 miliar). Besaran itu didapat dari hitung-hitungan pengeluaran maksimal pada tujuh kegiatan. Hampir separuh dari keseluruhan dana kampanye dialokasikan untuk pembuatan bahan kampanye.

Ketua KPU Bali I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dikonfirmasi, Minggu (11/2) kemarin, memaparkan simulasi pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali

2018. Ada tujuh uraian kegiatan di dalamnya, yakni rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, jasa manajemen/konsultan, alat peraga kampanye (baliho, umbul-umbul dan spanduk), dan bahan kampanye (*leaflet*, *pamflet*, *flyer*, dan poster).

"Untuk rapat umum masing-masing pasangan calon mengagendakan dua kali dengan jumlah massa 10 ribu orang. Dengan pengeluaran maksimal Rp 55 ribu untuk masing-masing orang, maka dibutuhkan dana Rp 1,1 miliar," ujarnya.

Raka Sandi menambahkan, pertemuan terbatas dirancang 17 kali melibatkan 1.500 orang/pertemuan

dengan anggaran maksimal Rp 250 ribu per orang. Pasalnya, pertemuan terbatas direncanakan berlangsung di hotel. Dari hitung-hitungan ini dibutuhkan Rp 6,375 miliar untuk pertemuan terbatas. Sementara pertemuan tatap muka akan dilaksanakan 716 kali, melibatkan 500 orang setiap kali pertemuan dengan pengeluaran Rp 35 ribu per orang, sehingga didapat angka Rp 12,530 miliar. "Baik pasangan calon maupun tim kampanye tidak memberi uang secara langsung kepada masyarakat (tapi dalam bentuk makanan atau bensin - red)," imbuh Raka Sandi.

Kemudian, pembuatan bahan kampanye dirancang

membutuhkan dana Rp 22,687 miliar atau hampir separuh dari keseluruhan dana kampanye. Angka itu didapat dari 30 persen jumlah pemilih dikali Rp 25 ribu. Pemilih sendiri tercatat berjumlah 3.025.066. Untuk jasa manajemen/konsultan dianggarkan Rp 100 juta, baliho Rp 252 juta, umbul-umbul Rp 427,5 juta, spanduk Rp 214,8 juta dan bahan kampanye Rp 2,847 miliar.

Baliho dibatasi sebanyak tujuh buah di masing-masing kabupaten/kota, spanduk masing-masing 30 buah di 57 kecamatan, dan spanduk masing-masing tiga buah di 716 desa. Sedangkan bahan kampanye berupa *leaflet*, *pamflet*, *flyer*

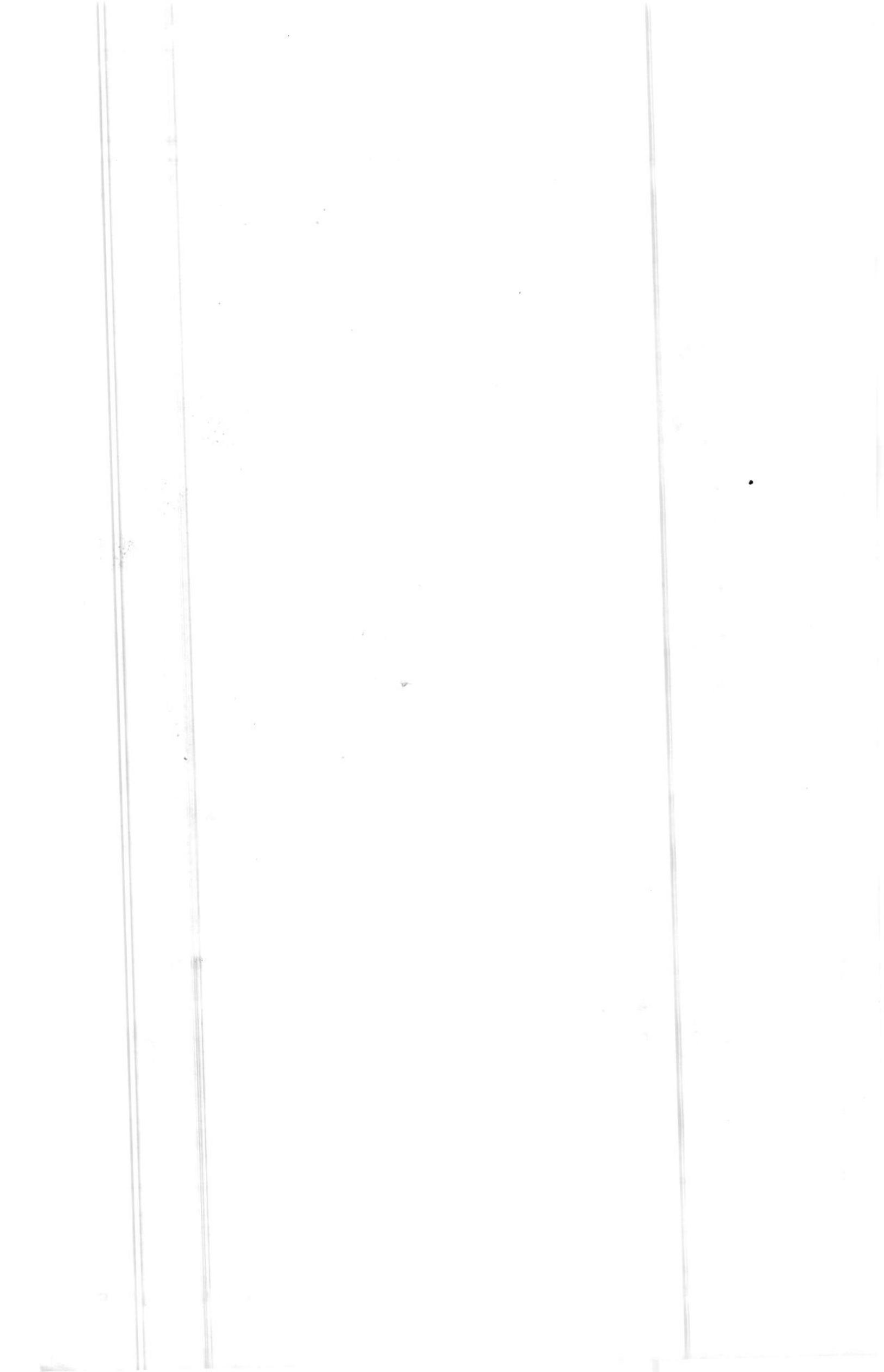
dan poster dianggarkan Rp 2.500 dikali 1.139.029 KK.

"Rancangan ini sudah disepakati oleh para pihak, dalam hal ini tim kampanye bakal pasangan calon. Segera akan diplenokan dan di-SK-kan oleh KPU Bali," jelas Raka Sandi.

Masa kampanye akan berlangsung mulai 15 Februari hingga 23 Juni mendatang atau empat bulan lebih. Masa kampanye pada Pilgub 2018 terbilang cukup panjang bila dibandingkan pilgub lima tahun lalu yang hanya 15 hari. Sebelum memasuki masa kampanye, KPU Bali mengagendakan penetapan pasangan calon pada Senin (12/2) ini dan pengundian nomor urut pada Selasa (13/2). (kmb32)

Edisi : Senin, 12 Feb 2018

Hal : 1





Dugaan "Mark-up" Anggaran Pertandingan

# Kejari Periksa Panitia

## Bupati Cup 2016

Gianyar (Bali Post) -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar tengah mendalami dugaan penyimpangan anggaran penyelenggaraan turnamen sepak bola Bupati Gianyar Cup tahun 2016. Pengurus PSSI Gianyar yang menjadi panitia penyelenggara ajang bergengsi itu, secara bergantian dipanggil ke kantor Kejari. "Yang diperiksa panitianya. Dan mereka sudah dipanggil," ujar Kasi Pidsus Kejari Gianyar Made Endra Arianto, Minggu (11/2) kemarin.



Bali Post/nik  
**Kasi Pidsus Kejari Made Endra Arianto.**

Dikatakannya, ada banyak panitia Bupati Cup yang sudah diperiksa Kejari. Panitia dimaksud mulai dari seksi perlengkapan hingga seksi pertandingan. Mengenai rincian permasalahan yang melilit PSSI dan panitia kegiatan tersebut, Endra enggan menjabarkannya. "Kalau bicara masalah, nanti masuk dalam materi penyelidikan kami," terangnya.

Ditegaskannya, pihaknya tengah fokus memeriksa ang-

garan yang digunakan selama pertandingan itu. Terlebih, dana yang digunakan berasal dari pemerintah daerah. "Yang jelas kami periksa dugaan *mark-up*, gitu sajalah," katanya.

Walaupun masih dalam tahap penyelidikan, namun Endra mengaku sudah melihat ada bentuk penyimpangan yang terjadi pada penyelenggaraan event tersebut. "Makanya dilidik. Ini kami mencari peristiwa pidana. Ini kan

langsung meningkatkan kasus ini ke penyidikan dan menyeret tersangka. "Harapan saya bisa lanjut. Kalau peristiwa pidana kami temukan, alat bukti cukup, ya jelas ini berlanjut," ujar Endra.

kami dalam rangka mencari itu, melakukan pengumpulan data dan keterangan," jelasnya.

Menurutnya, hingga beberapa pekan ke depan, pihaknya akan terus melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terlibat di dalam turnamen sepak bola tahunan itu. Endra mengaku optimistis kasus ini bisa naik status dari penyelidikan ke penyidikan.

Bila alat bukti sudah dipandang cukup, pihaknya akan

Ketua PSSI Kabupaten Gianyar Pande Purwata yang dihubungi via telepon belum mau memberikan penjelasan mengenai dugaan *mark-up* tersebut. "Nanti saja klarifikasi. Biarkan dulu berjalan," ujarnya singkat.

Untuk diketahui, turnamen sepak bola Bupati Cup 2016 diselenggarakan Juli 2016 lalu. Pertandingan diikuti 38 tim sepak bola dari seluruh Gianyar. (kmb35)

Edisi : Senin, 12 Februari 2018

Hal : 9